

SEJARAH PERKEMBANGAN MADRASAH DI PAKISTAN DALAM PENDIDIKAN ISLAM MODERN

Ishmatunisa Syarif

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Ayu Mukti Sari

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Zahwa Nurmalita Adityas

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Alamat: Jl. A. Yani No.40A, Karanganjing, Purwanegara, Purwokerto Utara, Banyumas

Korespondensi penulis: 234110402221@mhs.uinsaizu.ac.id¹, 234110402305@mhs.uinsaizu.ac.id²,
234110402193@mhs.uinsaizu.ac.id³

Abstrak. *Madrasah is an Islamic educational institution with a long history in Pakistan, from the pre-independence era to the modern Islamic education era. This study aims to historically examine the development of madrasahs in Pakistan and their relevance in the context of modern Islamic education. The study covers the historical roots of madrasahs in the Mughal and British colonial era, post-independence developments, expansion during the Zia ul-Haq era, radicalism issues after the September 11, 2001 events, and government reform and modernization efforts. The results show that madrasahs in Pakistan have undergone complex transformations, influenced by political, social, and global dynamics. Curriculum reforms such as the Single National Curriculum (SNC) and madrasah regulation are strategic steps, but still face ideological resistance. Madrasahs in Pakistan need to continue transforming to address the challenges of Islamic education in the modern era without abandoning their Islamic identity.*

Keywords: *Madrasah; Pakistan; Islamic Education; History; Modernization.*

Abstrak. Madrasah merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki sejarah panjang di Pakistan, mulai dari era pra-kemerdekaan hingga era pendidikan Islam modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara historis perkembangan madrasah di Pakistan serta relevansinya dalam konteks pendidikan Islam modern. Kajian ini meliputi akar sejarah madrasah pada era Mughal dan kolonial Inggris, perkembangan pasca-kemerdekaan, ekspansi pada era Zia ul-Haq, isu radikalisme pasca peristiwa 11 September 2001, hingga upaya reformasi dan modernisasi yang dilakukan pemerintah Pakistan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa madrasah di Pakistan mengalami transformasi yang kompleks, dipengaruhi oleh dinamika politik, sosial, dan global. Reformasi kurikulum seperti penerapan Single National Curriculum (SNC) dan regulasi madrasah merupakan langkah strategis, namun masih menghadapi resistensi ideologis. Madrasah di Pakistan perlu terus bertransformasi agar mampu menjawab tantangan pendidikan Islam di era modern tanpa meninggalkan identitas keislamannya.

Kata Kunci: Madrasah; Pakistan; Pendidikan Islam; Sejarah; Modernisasi.

PENDAHULUAN

Madrasah sebagai institusi pendidikan Islam memiliki peran historis yang sangat penting dalam membentuk tradisi keilmuan, transmisi nilai-nilai keagamaan, serta pembentukan identitas sosial umat Muslim. Di Pakistan, madrasah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan agama, tetapi juga menjadi bagian integral dari dinamika sosial, politik, dan ideologis negara tersebut. Sejak berdirinya Pakistan pada tahun 1947 sebagai negara yang berlandaskan identitas Islam, madrasah mengalami perkembangan yang signifikan baik dari segi jumlah, kurikulum, maupun perannya dalam masyarakat.

Perkembangan madrasah di Pakistan tidak dapat dilepaskan dari konteks sejarah yang lebih luas, termasuk warisan pendidikan Islam pada masa kolonial India, dinamika politik domestik,

serta pengaruh global terhadap dunia Islam. Dalam perjalanannya, madrasah di Pakistan mengalami berbagai fase transformasi, mulai dari lembaga tradisional yang berfokus pada studi keislaman klasik hingga menjadi institusi yang turut terlibat dalam isu-isu kontemporer seperti radikalisme, globalisasi, dan modernisasi pendidikan.

Pada periode pra-kemerdekaan, madrasah berkembang sebagai bentuk resistensi terhadap sistem pendidikan kolonial dan sebagai upaya mempertahankan identitas keislaman. Setelah kemerdekaan, peran madrasah semakin kompleks seiring dengan kebutuhan negara dalam membangun sistem pendidikan nasional. Memasuki era pemerintahan Zia ul-Haq, madrasah mengalami ekspansi besar-besaran yang turut dipengaruhi oleh kebijakan Islamisasi negara. Namun, pasca peristiwa 11 September 2001, madrasah di Pakistan menjadi sorotan dunia internasional, terutama terkait isu radikalisme dan keamanan global.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, upaya reformasi dan modernisasi madrasah terus dilakukan oleh pemerintah Pakistan dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Transformasi ini mencakup integrasi kurikulum umum, peningkatan kualitas pendidikan, serta penyesuaian dengan tuntutan pendidikan Islam modern. Oleh karena itu, penting untuk memahami perkembangan madrasah di Pakistan secara komprehensif agar dapat melihat posisi dan kontribusinya dalam konteks pendidikan Islam kontemporer.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara historis dan analitis perkembangan madrasah di Pakistan dalam kerangka pendidikan Islam modern. Pembahasan akan meliputi gambaran umum Pakistan dan Islam, sejarah awal madrasah pada masa pra-kemerdekaan, perkembangan pasca-kemerdekaan, ekspansi pada era Zia ul-Haq, keterkaitan madrasah dengan isu radikalisme pasca 9/11, upaya reformasi dan modernisasi, serta posisi madrasah dalam lanskap pendidikan Islam modern saat ini.

KAJIAN TEORI

a. Konsep Pendidikan Islam

Pendidikan Islam secara konseptual merupakan sebuah sistem yang dinamis, mencakup gagasan teoretis dan manajemen kegiatan keagamaan yang bersifat formal-birokratis. Dalam pemaknaannya yang lebih luas, pendidikan Islam juga dipahami sebagai upaya pengajaran nilai-nilai keislaman yang berakar pada lingkungan keluarga dan masyarakat, yang berfungsi sebagai instrumen transmisi budaya dan identitas. Dalam konteks Pakistan, madrasah berfungsi sebagai perpanjangan tangan dari sistem ini untuk memastikan nilai-nilai Islam tetap terjaga di tengah arus modernitas. Tujuan utama dari pendidikan Islam adalah mengaktualisasikan potensi manusia secara holistik, meliputi aspek biologis, psikologis, sosiologis, dan religius.

Pendidikan bukan sekadar proses transfer pengetahuan, melainkan sebuah media atau wasilah untuk mengantarkan subjek didik (*muta'allim*) menuju tujuan hidup yang selaras dengan pandangan dunia (*worldview*) Islam. Oleh karena itu, madrasah di Pakistan idealnya tidak hanya mencetak ahli agama, tetapi juga individu yang memiliki keseimbangan antara kualitas jasmani dan rohani. Prinsip dasar pendidikan Islam bertumpu pada integritas antara wahyu dan nalar. Hal ini mengimplikasikan bahwa seluruh proses pendidikan harus didasarkan pada tauhid, di mana ilmu pengetahuan umum tidak dipisahkan dari fondasi keimanan. Di Pakistan, prinsip ini sering kali menghadapi tantangan akibat pola pendidikan yang masih menomorduakan ilmu-ilmu rasional dibandingkan ilmu-ilmu wahyu, sehingga diperlukan rekonstruksi pemikiran yang lebih inklusif (Hidayat, 2020).

b. Konsep Madrasah dalam Pendidikan Islam

Madrasah merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki karakteristik khusus dalam pelestarian khazanah keilmuan Islam klasik. Secara historis, madrasah muncul sebagai institusi terorganisir yang berfungsi untuk menjaga ortodoksi agama serta melahirkan intelektual muslim. Karakteristik madrasah di Pakistan yang sangat kuat dengan kurikulum Dars-e-Nizami menunjukkan kecenderungan aliran religius-konservatif yang berfokus pada kemurnian ajaran (Hidayat, 2025). Peran madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam sangat strategis dalam membentengi identitas Muslim dari pengaruh eksternal, terutama pada masa kolonial. Madrasah bukan sekadar tempat belajar, melainkan representasi dari komitmen kolektif masyarakat untuk mempertahankan "fitrah" kebudayaan mereka (Hidayat, 2020).

Di Pakistan, madrasah telah menjadi pilar utama pendidikan bagi masyarakat kelas bawah yang tidak memiliki akses ke sekolah umum berbayar, sehingga menjadikannya lembaga yang paling dekat dengan denyut nadi rakyat. Fungsi sosial dan keagamaan madrasah melampaui batas-batas ruang kelas, ia berfungsi sebagai pusat gerakan sosial dan pengintegrasikan tatanan kemasyarakatan. Pendidikan dalam madrasah diartikan sebagai ide kolektif yang termanifestasi dalam perilaku masyarakat. Hal ini menjelaskan mengapa di Pakistan, madrasah memiliki kekuatan mobilisasi massa yang signifikan, di mana pengamalan agama dan aksi kemasyarakatan sering kali menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan (Hidayat, 2022).

c. Pendidikan Islam Modern

Modernisasi pendidikan Islam dipahami sebagai upaya untuk menyelaraskan sistem pendidikan dengan tuntutan zaman tanpa mengorbankan nilai-nilai substansial agama. Hal ini mencakup rasionalisasi praktik keagamaan dan adopsi metodologi pembelajaran yang lebih progresif. Dalam konteks Pakistan, modernisasi ini tercermin dalam upaya integrasi mata pelajaran umum ke dalam kurikulum madrasah guna mencetak lulusan yang kompeten secara spiritual dan profesional (Hidayat, 2023). Faktor utama yang mendorong pembaruan pendidikan Islam adalah adanya kesenjangan kualitas antara pendidikan Islam dan pendidikan Barat. Adanya hegemoni kebudayaan luar menuntut lembaga pendidikan Islam untuk melakukan kontekstualisasi ilmu pengetahuan agar tetap relevan.

Di Pakistan, dorongan ini semakin kuat pasca peristiwa 9/11, di mana tuntutan global untuk reformasi pendidikan menjadi katalisator bagi pemerintah untuk memodernisasi sistem madrasah secara masif. Integrasi ilmu agama dan ilmu umum menjadi inti dari paradigma pendidikan Islam modern. Upaya ini didasarkan pada penolakan terhadap dikotomi ilmu yang memisahkan antara fardhu ain dan fardhu kifayah secara tajam. Pemikiran Fazlur Rahman di Pakistan yang menekankan pentingnya integrasi-interkoneksi ilmu sejalan dengan gagasan bahwa seluruh pengetahuan pada dasarnya berasal dari Tuhan. Modernisasi madrasah di Pakistan, melalui program seperti Single National Curriculum, berupaya menghapuskan dualisme ini agar lulusan madrasah dapat bersaing di pasar kerja global (Hidayat, 2020).

d. Dinamika dan Transformasi Lembaga Pendidikan Islam

Dinamika lembaga pendidikan Islam diwarnai oleh perubahan sistem dan kurikulum sebagai respons terhadap tantangan internal dan eksternal. Transformasi ini sering kali melibatkan pergeseran dari model tradisional yang tertutup menuju model yang lebih terbuka terhadap perkembangan sains. Di Pakistan, transformasi madrasah terlihat jelas dari perubahan peran madrasah yang awalnya hanya sebagai pusat studi teologi menjadi lembaga yang juga mengajarkan sains dan teknologi modern (Hidayat, 2025). Adaptasi lembaga pendidikan terhadap perkembangan zaman memerlukan kepemimpinan yang visioner dan

transformatif. Lembaga pendidikan Islam tidak boleh bersikap reaktif, melainkan harus proaktif dalam membangun paradigma yang "islami" namun tetap modern secara metodologis (Hidayat, 2020).

Madrasah di Pakistan yang mulai mengadopsi fasilitas kelas modern dan sistem evaluasi terstandarisasi merupakan bentuk adaptasi fisik, namun tantangan terberatnya tetap pada adaptasi pola pikir para pengelolanya. Hubungan pendidikan Islam dengan perubahan sosial bersifat timbal balik, pendidikan adalah respons terhadap kondisi masyarakat sekaligus agen penggerak perubahan. Pendidikan harus mampu memberikan jawaban atas realitas permasalahan sosial yang ada pada zamannya. Perkembangan madrasah di Pakistan sangat dipengaruhi oleh dinamika politik negara, di mana kebijakan pemerintah sering kali menjadi penentu arah transformasi lembaga pendidikan Islam tersebut (Hidayat, 2022).

e. Kerangka Teoretis Sejarah Perkembangan Madrasah di Pakistan

Teori modernisasi pendidikan Islam dalam kajian ini berpijak pada gagasan pembaruan tanpa sekularisasi, di mana kemajuan dicapai melalui integrasi kurikulum dan perbaikan manajemen (Hidayat, 2023). Modernisasi bukan berarti adopsi buta terhadap Barat, melainkan penyaringan ilmu pengetahuan melalui Islamic worldview). Teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana madrasah di Pakistan berupaya bertransformasi di bawah tekanan global dan kebutuhan domestik. Teori perubahan sosial dalam pendidikan memandang madrasah sebagai instrumen perjuangan identitas dan gerakan nasionalisme.

Perubahan sosial di Pakistan, mulai dari era Zia ul-Haq hingga pasca 9/11, telah mengubah fungsi madrasah dari pusat keagamaan murni menjadi subjek diskursus keamanan dan integrasi nasional (Hidayat, 2022). Hal ini sejalan dengan teori bahwa lembaga pendidikan akan selalu bergerak mengikuti dinamika sosiologis masyarakatnya. Relevansi trikotomi filsafat pendidikan religius-konservatif, religius-rasional, dan pragmatis-instrumental menjadi pisau bedah utama dalam menganalisis sejarah madrasah di Pakistan. Aliran konservatif terlihat pada madrasah yang mempertahankan Dars-e-Nizami, aliran rasional pada upaya reformasi kurikulum pemerintah, dan aliran pragmatis pada madrasah yang mulai fokus pada keterampilan vokasional (Hidayat, 2025). Ketiga pilar teori ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami evolusi madrasah di Pakistan dalam lanskap pendidikan Islam modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan mengkaji dan menganalisis perkembangan historis madrasah di Pakistan secara mendalam dan komprehensif berdasarkan sumber-sumber literatur yang relevan. Sumber data dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi jurnal ilmiah dan artikel akademik. Sumber sekunder mencakup buku-buku akademik. Teknik pengumpulan data dengan telaah literatur secara sistematis. Data yang terkumpul di analisis untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai perkembangan madrasah di Pakistan dalam konteks pendidikan Islam modern.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Secara konseptual, pendidikan Islam harus dipahami dalam dua ranah yang saling berkaitan: sebagai sebuah sistem manajemen kegiatan keagamaan yang bersifat formal-birokratis, dan sebagai upaya pengajaran nilai-nilai keislaman (pendidikan keislaman) yang berakar pada

masyarakat. Sebagai sebuah sistem, pendidikan Islam memerlukan institusi yang mengatur regulasi dan kurikulum guna mengaktualisasikan potensi manusia secara holistik, baik secara biologis, psikologis, maupun religius. Dalam konteks Pakistan, madrasah tidak sekadar menjadi tempat transmisi ilmu, tetapi berfungsi sebagai medium untuk mengantarkan subjek didik (muta'allim) menuju tujuan hidup yang selaras dengan pandangan dunia Islam (worldview), di mana keseimbangan antara kualitas jasmani dan rohani menjadi inti dari proses pendidikan tersebut (Hidayat, 2020).

1. Gambaran Umum Pakistan dan Islam

Pakistan adalah sebuah negara di wilayah Asia Selatan yang memiliki lokasi geografis yang cukup strategis. Negara tersebut berbatasan dengan India di timur, Afghanistan dan Iran di barat, China di utara, serta Samudra Hindia di selatan. Dari segi administratif, ibu kota Pakistan adalah Islamabad, sedangkan kota terbesarnya adalah Karachi. Dengan lebih dari 200 juta jiwa, Pakistan merupakan salah satu negara dengan populasi Muslim terbanyak di dunia. Secara historis, Pakistan muncul dari proses panjang pemisahan wilayah India yang terjadi pada tahun 1947. Pemisahan ini didorong oleh keinginan masyarakat Muslim di India untuk memiliki negara sendiri yang bisa menjamin kebebasan menjalankan ajaran agama serta melindungi identitas sosial dan politik mereka. Ide ini muncul dari pemikiran para tokoh Islam seperti Muhammad Iqbal dan kemudian diwujudkan secara nyata oleh Muhammad Ali Jinnah (Inayati et al., 2022).

Dari segi demografis, sebagian besar populasi Pakistan mengikuti agama Islam. Ini menjadikan Islam bukan hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai dasar dalam kehidupan sosial, budaya, dan politik masyarakat. Dalam pelaksanaannya, nilai-nilai Islam berkontribusi dalam membangun norma sosial, struktur hukum, serta kebijakan pemerintah. Sebagai akibatnya, Pakistan sering dilihat sebagai negara dengan ciri khas negara Islam yang moder. Masuknya Islam ke daerah Pakistan memiliki sejarah yang cukup panjang, dimulai sejak abad ke-7 melalui perdagangan, penyebaran ajaran, dan perluasan militer. Islam menyebar secara bertahap melalui interaksi antara masyarakat lokal, ulama, dan pedagang. Seiring berjalannya waktu, Islam semakin mendalam melalui dominasi dinasti-dinasti Islam seperti Ghaznawi, Ghurid, dan Mughal yang menguatkan posisi Islam dalam tatanan sosial.

Dalam konteks saat ini, Islam di Pakistan bukan hanya sebagai identitas religius, tetapi juga berperan sebagai ideologi negara. Ini tercermin dari berbagai kebijakan yang berusaha menggabungkan ajaran Islam ke dalam sistem pemerintahan. Namun, Pakistan juga menghadapi sejumlah tantangan, seperti konflik internal, ketimpangan ekonomi, dan masalah ekstremisme yang berkontribusi pada stabilitas negara. Disisi lain, keberagaman budaya dan etnis di Pakistan juga merupakan salah satu karakteristik negara ini. meskipun sebagian besar penduduknya beragama Islam, terdapat bermacam kelompok etnis dengan bahasa serta tradisi yang berbeda-beda. Keadaan ini mengindikasikan bahwa Pakistan adalah negara yang tidak hanya dibentuk oleh agama, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika sosial dan budaya yang rumit (Arki, 2018).

Dengan demikian, gambaran umum Pakistan dan Islam menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara aspek sejarah, agama, dan politik. Pakistan tidak hanya berdiri sebagai negara bangsa, tetapi juga sebagai representasi dari perjuangan umat Islam dalam mempertahankan identitas dan membangun sistem kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam di tengah tantangan modernitas.

2. Sejarah Awal Madrasah (pra-kemerdekaan)

Pada era pra-kemerdekaan, madrasah di anak benua India berfungsi lebih dari sekadar lembaga akademik, ia berperan sebagai pusat gerakan sosial yang melawan hegemoni kebudayaan kolonial. Hal ini sejalan dengan tesis bahwa pendidikan merupakan ide dan pikiran kolektif yang termanifestasi dalam perilaku masyarakat untuk mengintegrasikan tatanan sosial. Madrasah menjadi benteng pelestarian identitas dan "fitrah" kebudayaan masyarakat Muslim dari pengaruh sekularisme Barat. Sebagai institusi yang lahir dari komunitas, madrasah merepresentasikan komitmen filosofis terhadap nilai-nilai lokal, di mana pengamalan agama tidak dipisahkan dari urusan kemasyarakatan, melainkan menjadi dasar dalam membangun norma dan struktur sosial yang mandiri (Hidayat, 2022).

Sejarah awal madrasah di daerah yang kini dikenal sebagai Pakistan (sebelumnya bagian dari India Britania) mencerminkan dinamika intelektual yang beralih dari pusat peradaban unggul menjadi alat perlawanan budaya. Sebelum kekuatan kolonial semakin meningkat, madrasah di anak benua India menjadi lembaga utama yang mengendalikan penyebaran ilmu pengetahuan Islam serta melahirkan pejabat dan intelektual untuk sistem pemerintahan Muslim, terutama pada era Kerajaan Mughal (Delvia et al. 2025). Momen penting dalam sejarah kurikulum madrasah berlangsung pada abad ke-18 dengan kemunculan sistem Dars-e-Nizami yang dirumuskan oleh Mulla Nizamuddin dari Lucknow (Delvia et al., 2025). Kurikulum ini sangat menyeluruh karena tidak hanya memprioritaskan ilmu tradisional (manqulat) seperti tafsir dan hadis, tetapi juga sangat menekankan ilmu rasional (ma'qulat) meliputi logika (mantiq), filsafat, dan matematika, yang kemudian menjadi tolok ukur pendidikan tinggi Islam di wilayah tersebut (Delvia et al., 2025).

Memasuki abad ke-19, runtuhnya kekuasaan Mughal dan meningkatnya dominasi kolonial Inggris memberikan dampak merugikan pada keberadaan madrasah. Pemerintah kolonial menerapkan kebijakan sistemik untuk memarginalkan umat Islam, merusak posisi sosial-ekonomi mereka dengan menetapkan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi pada tahun 1835, yang secara otomatis mengeluarkan lulusan madrasah dari sistem administrasi dan hukum (Sri Mulyati et al., 2023). Dalam tahap ini, umat Islam dianggap sebagai sasaran kecurigaan politik oleh penjajah Inggris, sehingga akses mereka terhadap pendidikan tinggi profesional dan posisi pemerintahan dibatasi (Sri Mulyati et al., 2023). Sebagai akibatnya, madrasah mengalami perubahan peran dari yang dulunya merupakan lembaga pembentuk elit bangsa, kini berfungsi sebagai penjaga identitas untuk melindungi nilai-nilai Islam agar tidak terintegrasi dengan budaya Barat dan sekularisme kolonial (Delvia et al., 2025).

Menjelang kemerdekaan 1947, madrasah-madrasah di daerah seperti Punjab, Sindh, dan NWFP berubah menjadi landasan konsolidasi ideologi yang mendukung pembentukan Pakistan. Ini sangat terkait dengan pengembangan narasi Teori Dua Bangsa yang menyatakan bahwa umat Islam merupakan kelompok etnis yang secara mendasar berbeda dari mayoritas Hindu dalam aspek budaya, sosial, dan hukum (Sri Mulyati et al., 2023). Madrasah berfungsi sebagai penggerak bagi komunitas Muslim kelas menengah ke bawah untuk memperjuangkan sebuah negara berdaulat di mana mereka dapat melaksanakan syariat dan etika Islam tanpa campur tangan dari luar. Oleh karena itu, pada periode pra-kemerdekaan, madrasah tidak hanya berfungsi sebagai tempat pendidikan agama, tetapi juga sebagai inti dari gerakan politik dan reformasi yang membentuk dasar konstitusional bagi lahirnya Republik Islam Pakistan (Delvia et al., 2025).

3. Perkembangan Madrasah Pasca Kemerdekaan (tahun 1947-1970an)

Transformasi lembaga pendidikan Islam di Pakistan pasca-kemerdekaan dapat dianalisis melalui kerangka trikotomi filsafat pendidikan Islam, yaitu aliran religius

konservatif, religius-rasional, dan pragmatis-instrumental. Kelompok madrasah tradisional umumnya berpijak pada aliran religius-konservatif yang berfokus pada pelestarian kemurnian ajaran agama melalui kurikulum *Dars-e-Nizami* yang sangat menekankan ilmu-ilmu wahyu. Namun, dinamika sosial menuntut adanya pergeseran menuju orientasi religius-rasional yang berupaya mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum sebagai instrumen spiritual, atau bahkan aliran pragmatis-instrumental yang menekankan fungsi praktis pendidikan untuk memperbaiki taraf hidup sosial-ekonomi masyarakat (Hidayat, 2025).

Pasca kemerdekaan Pakistan pada tahun 1947, perkembangan madrasah memasuki babak baru yang berfokus pada integrasi identitas keislaman ke dalam sistem pendidikan nasional guna memperkuat persatuan bangsa. Sejalan dengan arahan Muhammad Ali Jinnah dalam Konferensi Pendidikan Nasional pertama tahun 1947, sistem pendidikan diupayakan untuk selaras dengan karakter, budaya, dan sejarah rakyat Pakistan guna menanamkan rasa kehormatan serta integritas (Arikarani 2019). Pada periode ini, pemerintah mulai mewajibkan pendidikan agama bagi seluruh pelajar Muslim di setiap tingkatan sebagai bagian dari karakter ideologi negara yang berlandaskan Islam (Safarudin et al., 2024). Meskipun demikian, Pakistan mengadopsi sistem pendidikan dualistik di mana lembaga pendidikan modern berjalan berdampingan dengan sistem madrasah tradisional yang tetap mempertahankan otonomi manajemennya tanpa campur tangan signifikan dari pemerintah federal maupun provinsi (Safarudin et al., 2024) (Arikarani, 2019).

Dalam rentang tahun 1950-an hingga 1970-an, upaya untuk menjembatani kesenjangan antara pendidikan tradisional dan modern terus dilakukan, salah satunya melalui pemberian subsidi kepada lembaga tradisional seperti maktab dan madrasah setara dengan sekolah modern (Safarudin et al., 2024). Di level pendidikan tinggi, Universitas Punjab di Lahore yang merupakan satu-satunya universitas saat pemisahan tahun 1947, mendirikan Departemen Islamiyat pada tahun 1950 untuk memperkuat kajian keagamaan dalam kurikulum umum. Madrasah-madrasah pada masa ini memainkan peran vital dalam melestarikan nilai-nilai ortodoks Islam melalui penerapan kurikulum *Dars-i-Nizami* yang mencakup 20 mata pelajaran, yang terdiri dari ilmu-ilmu wahyu dan ilmu rasional. Melalui pengarusutamaan ini, madrasah tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan agama, tetapi juga berupaya memperluas peluang kerja bagi lulusannya agar dapat terserap ke dalam arus utama pembangunan sektor pendidikan Pakistan (Arikarani, 2019).

4. Era Islamisasi Jenderal Zia ul-Haq dan Ekspansi Madrasah (1977–1988)

Di Pakistan, perjuangan untuk mendefinisikan “Republik Islam” telah mendominasi wacana politik sejak kemerdekaan. Meskipun pendirinya, Ali Jinnah, memiliki visi yang cenderung sekuler, akan tetapi tekanan dari kelompok-kelompok Islamis dan kebutuhan akan sebuah ideologi pemersatu membawa Pakistan kepada penguatan Islam. Proses ini mencapai puncaknya di bawah kediktatoran militer Jenderal Ziaul Haq yang pada tahun 1980-an menerapkan hukum-hukum syariat dan mempromosikan bentuk Islam di sekolah-sekolah dan ruang publik (Hidayat, 2026). Konstitusi Pakistan mencerminkan peran dominan Islam dalam berbagai aspek kehidupan negara. Konstitusi tahun 1973, yang masih berlaku hingga sekarang dengan berbagai amandemen, secara resmi menyatakan bahwa “Islam shall be the State religion of Pakistan” (Wijianto et al., 2024). Konstitusi juga menyebutkan bahwa tidak ada undang-undang yang dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam sebagaimana termaktub dalam Al-Qur’an dan Sunnah. Selain itu, syarat untuk menjadi presiden dan perdana menteri adalah seorang muslim, menunjukkan integrasi antara agama dan kualifikasi politik.

Untuk memastikan harmonisasi antara hukum positif dan hukum Islam, Pakistan membentuk lembaga-lembaga seperti Federal Shariat Court (FSC) dan Council of Islamic Ideology (CII). FSC memiliki wewenang untuk menyatakan batal undang-undang yang bertentangan dengan syariat, sementara CII berperan memberikan rekomendasi kepada parlemen agar hukum-hukum nasional tetap selaras dengan ajaran Islam. Upaya Islamisasi hukum semakin menonjol pada masa pemerintahan Jenderal Muhammad Zia-ul-Haq (1977–1988), yang menerapkan hukum Hudud, ordinansi zakat dan ushrah, serta memperkenalkan sistem peradilan yang lebih Islami. Kebijakan-kebijakan ini menciptakan perubahan besar dalam karakter hukum Pakistan, meskipun juga menuai kritik dari berbagai pihak karena dituding digunakan untuk legitimasi kekuasaan militer dan represif terhadap minoritas (Hidayat, 2026).

Dalam sektor pendidikan umum, kebijakan utama pemerintah adalah menjadikan mata pelajaran Islamiyat sebagai kurikulum wajib bagi semua siswa muslim dari tingkat dasar hingga menengah. Islamiyat tidak hanya mencakup ajaran dasar seperti akidah, ibadah, dan akhlak, tetapi juga sejarah Islam, studi Al-Qur'an dan Hadis, serta penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Konten Islamiyat terus diperbarui untuk mengakomodasi kebutuhan zaman dan menjaga keseimbangan antara ortodoksi dan moderasi (Azzahra, 2025). Salah satu kebijakan paling ambisius dalam konteks ini adalah peluncuran Single National Curriculum (SNC), yang dimulai pada tahun 2020 sebagai upaya besar pemerintah untuk menyeragamkan kurikulum antara sekolah negeri, swasta, dan madrasah.

SNC bertujuan untuk menghilangkan fragmentasi sistem pendidikan dan memastikan bahwa seluruh warga negara, tanpa memandang latar belakang sosial-ekonomi, memperoleh pendidikan Islam yang seragam dan sesuai dengan prinsip inklusif, moderat, serta patriotik. SNC juga mencerminkan semangat Islamisasi pendidikan ala Zia-ul-Haq pada era 1980-an, namun dikemas dalam narasi reformasi dan modernisasi yang lebih sesuai dengan wacana kontemporer (Delvia et al. 2025). Pendidikan agama Islam di Pakistan terbagi kepada tiga kategori yakni: Quranic School, Mosque Primary School dan Madrasah. Pertama adalah sekolah dimana anak-anak belajar membaca Al-Qur'an. Tempat biasanya di masjid-masjid atau mushalla desa. Waktu belajar tidak teratur dengan jelas, bisa pagi, siang, atau sore. Ustadz yang mengajar biasanya berasal dari desa tersebut. Kedua adalah sekolah dasar masjid, yaitu masjid dijadikan tempat belajar bagi anak-anak yang sudah berumur 7 tahun ke atas.

Inisiatif tersebut resmi dilakukan oleh pemerintah Zia-ul-Haq pada tahun 1980-an untuk mengatasi minimnya tempat belajar di pedesaan di sebagian wilayah Pakistan. Selain belajar Al-Qur'an, mereka juga diajarkan oleh imam masjid setempat mata pelajaran bahasa Urdu dan matematika. Namun pendidikan ini sering terkendala karena para imam jarang menguasai bahasa Urdu dan matematika dengan baik, sehingga banyak sekolah akhirnya gulung tikar. Saat ini jumlah Mosque Primary School di seluruh Pakistan sekitar 25.000 sekolah. Ketiga adalah madrasah. Madrasah di Pakistan berbeda dengan pesantren di Indonesia. Di Indonesia, para santri tidak diwajibkan untuk menghafal Al-Qur'an seluruhnya, kecuali di pesantren khusus tahfiz. Berbeda dengan di Pakistan, madrasah mewajibkan murid-muridnya untuk menghafal Al-Qur'an 30 juz sebelum mempelajari materi lainnya, karena Al-Qur'an dianggap sebagai dasar utama dalam pendalaman ilmu agama (Samdani, 2021).

Sekolah dasar masjid merupakan salah satu bentuk implementasi pendidikan tersebut. Masjid dijadikan tempat belajar bagi anak-anak berusia 7 tahun ke atas. Program ini diinisiasi oleh pemerintah Zia-ul-Haq pada tahun 1980-an untuk mengatasi keterbatasan akses pendidikan di pedesaan Pakistan. Selain belajar Al-Qur'an, para siswa juga diajarkan bahasa Urdu dan matematika oleh imam setempat. Namun dalam praktiknya, program ini menghadapi kendala karena banyak imam yang tidak memiliki kompetensi memadai dalam mengajarkan mata pelajaran umum tersebut. Akibatnya, banyak sekolah yang tidak bertahan. Saat ini, jumlah primary school di seluruh Pakistan sekitar 25.000 sekolah (Martajasa, 2024).

5. Madrasah, Radikalisme, Tekanan Global (Pasca 9/11)

Peristiwa serangan 11 September 2001 (9/11) menjadi titik balik fundamental bagi eksistensi madrasah di Pakistan, mengubah persepsi internasional dari lembaga pelestari tradisi menjadi subjek dalam diskursus keamanan global. Secara historis, benih keterkaitan madrasah dengan aktivitas militansi telah muncul jauh sebelum tragedi tersebut, khususnya selama periode perang Afghanistan-Uni Soviet. Pada masa itu, madrasah di wilayah perbatasan North Western Frontier Province (NWFP) tidak hanya berfungsi sebagai pusat pengajaran kitab-kitab turath (klasik), tetapi juga diinstrumentalisasi sebagai tempat pelatihan militer dan persemaian semangat jihad bagi para santri (Samdani, 2021). Pasca-9/11, perhatian dunia internasional, terutama Barat, meningkat tajam terhadap madrasah karena dianggap sebagai salah satu faktor krusial dalam problematika terorisme transnasional (Safarudin et al., 2024).

Tuduhan terhadap keterlibatan madrasah dalam jaringan radikalisme didasarkan pada identifikasi objektif terhadap sebagian kecil lembaga yang terendus mendukung gerakan teroris (Samdani, 2021). Selain dikaitkan dengan terorisme global, madrasah di Pakistan sering dituding sebagai pemicu ketegangan sektarian internal yang berujung pada pertumpahan darah antar kelompok, seperti konflik antara Sunni Deobandi dan Syiah (Samdani, 2021). Stigma ini mengakibatkan seluruh institusi madrasah berada di bawah sorotan tajam, meskipun mayoritas besar madrasah di Pakistan tetap berfokus pada pendidikan tradisional yang bersifat konservatif dan tidak berafiliasi dengan kekerasan (Delvia et al., 2025).

Merespons tekanan internasional yang masif dan kebutuhan keamanan nasional, pemerintah Pakistan terutama di bawah kepemimpinan Presiden Pervez Musharraf meluncurkan serangkaian reformasi pendidikan yang ambisius. Pemerintah dituntut untuk menyeimbangkan identitas Pakistan sebagai negara Islam dengan komitmennya sebagai sekutu Barat dalam perang melawan terorisme (Delvia et al., 2025). Salah satu langkah tegas yang diambil adalah ancaman penutupan terhadap madrasah-madrasah ilegal serta kebijakan pemulangan pelajar asing tanpa dokumen resmi untuk memutus rantai penyebaran ideologi ekstremis, sebuah tindakan yang semakin diperketat setelah peristiwa bom London pada Juli 2005 (Samdani, 2021).

Kebijakan reformasi tersebut diwujudkan melalui program-program strategis seperti Madrasa Reform Project (MRP) dan National Education Policy 2009. Program ini bertujuan mengintegrasikan madrasah ke dalam arus utama sistem pendidikan nasional melalui proses registrasi massal dan modernisasi kurikulum (Safarudin et al., 2024). Pemerintah mendorong penyisipan mata pelajaran umum seperti sains, matematika, bahasa Inggris, dan komputer agar lulusan madrasah memiliki keterampilan yang relevan dengan pasar kerja modern. Inisiatif terbaru adalah pengenalan Single National Curriculum (SNC) yang dirancang untuk

menyeragamkan standar pendidikan serta menghilangkan fragmentasi antara sekolah negeri, swasta, dan madrasah (Delvia et al., 2025).

Lembaga internasional seperti UNESCO juga memainkan peran penting dalam mendorong modernisasi pendidikan di Pakistan. UNESCO mengembangkan sistem pelatihan guru untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang handal, bekerja sama dengan berbagai pihak untuk melakukan sertifikasi keahlian. Fokus dunia internasional tidak hanya terbatas pada pencegahan radikalisme, tetapi juga pada upaya peningkatan literasi dan melek huruf di Pakistan yang masih tergolong rendah, di mana madrasah dipandang sebagai mitra strategis dalam memberikan akses pendidikan gratis bagi masyarakat kelas bawah.

Secara kritis, analisis terhadap stigma radikalisme madrasah menunjukkan adanya dimensi yang kompleks antara fakta objektif dan kepentingan politis. Di satu sisi, identifikasi keterlibatan sebagian madrasah dalam militansi lintas batas adalah kenyataan historis yang tidak dapat diabaikan (Samdani, 2021). Namun di sisi lain, generalisasi stigma radikalisme terhadap seluruh sistem madrasah sering kali bersifat politis guna melegitimasi kontrol negara dan agenda sekularisasi Barat. Hal ini memicu resistensi ideologis dari para ulama yang melihat reformasi kurikulum sebagai bentuk intervensi negara terhadap otonomi lembaga (Delvia et al., 2025). Sintesis dari dinamika ini menunjukkan bahwa madrasah di Pakistan pasca-9/11 terus berada dalam ruang tarik-menarik antara menjaga orisinalitas tradisi keagamaan dan tuntutan untuk beradaptasi dengan standar modernitas global.

Pembaruan pendidikan di madrasah sering kali terjebak dalam tegangan antara tuntutan modernitas dan pemeliharaan tradisi. Dalam perspektif tipologi pemikiran, modernisasi tidak harus berarti sekularisasi atau adopsi buta terhadap simbol-simbol Barat. Sebagaimana terlihat dalam diskursus pendidikan Islam, terdapat model pembaruan yang menjadikan agama sebagai nilai substansial dalam gerakan nasionalisme tanpa harus kehilangan jati diri keislamannya. Modernisme madrasah yang ideal adalah yang mampu merasionalkan praktik keagamaan dan mengintegrasikan sistem pendidikan modern seperti penggunaan fasilitas kelas dan metode evaluasi terstruktur namun tetap menjadikan iman dan amal sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*progressive religious*) (Hidayat, 2023).

6. Reformasi dan Modernisasi Madrasah di Pakistan

Madrasah di Pakistan memiliki sejarah Panjang sudah ada jauh sebelum negara ini merdeka dan telah lama menjadi fondasi utama bagi transmisi ilmu-ilmu keislaman klasik kepada generasi Muslim. Ketika Pakistan berdiri pada 1947, madrasah tetap berdiri dan terus berkembang. Kurikulum yang digunakan, dikenal dengan nama *Dars-e-Nizami*, dikembangkan pada abad ke-18 oleh Mulla Nizamuddin dari Lucknow dan mencakup disiplin ilmu seperti nahwu, sharaf, mantiq, tafsir, hadis, fiqh, dan ushul fiqh. Meskipun kurikulum ini berhasil mencetak generasi ulama yang kompeten dalam tradisi keilmuan Islam klasik, ia kemudian semakin dipertanyakan relevansinya dalam menghadapi tuntutan dunia modern. Hal ini mendorong berbagai pihak, baik dari dalam negeri maupun komunitas internasional, untuk mendesak adanya reformasi yang substantif terhadap sistem pendidikan madrasah di Pakistan.

a. Dorongan Awal Reformasi

Pemerintah Pakistan sebenarnya sudah lama menyadari masalah ini. Dorongan reformasi madrasah sebenarnya sudah mulai bergulir bahkan sebelum tekanan internasional meningkat tajam pada awal abad ke-21. Sejak kemerdekaan Pakistan tahun 1947, pemerintah berulang kali mencoba merumuskan kebijakan pendidikan

nasional yang mampu mengintegrasikan sistem madrasah ke dalam arus utama pendidikan. Berbagai komisi pendidikan dibentuk, laporan-laporan kebijakan diterbitkan, namun hasilnya kerap tidak menyentuh akar persoalan yang sesungguhnya. Salah satu kendala terbesar adalah bahwa madrasah di Pakistan dikelola secara otonom oleh federasi-federasi keagamaan yang mewakili aliran-aliran besar Islam seperti Deobandi, Bareilvi, Ahl-e-Hadith, dan Syiah masing-masing memiliki kurikulum dan mekanisme sendiri. Kondisi ini membuat setiap upaya reformasi dari pemerintah pusat selalu menghadapi tembok resistensi yang keras.

Selain persoalan struktural, ada juga dimensi filosofis yang penting untuk dipahami. Lembaga pendidikan Islam tidak hanya berdiri sebagai institusi akademik semata, tetapi juga memiliki dimensi ideologis yang kuat. Ia menegaskan bahwa tujuan pendirian lembaga pendidikan tidak bisa dilepaskan dari keinginan untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan tertentu secara ideologis (Hidayat et al., 2025). Dalam konteks madrasah Pakistan, pemahaman ini sangat relevan. Para pemimpin federasi madrasah tidak menolak reformasi semata-mata karena keras kepala bagi mereka, kurikulum yang ada adalah bagian dari identitas ideologis yang sudah dijaga selama berabad-abad, dan mengubahnya atas tekanan pemerintah dianggap sebagai ancaman terhadap integritas lembaga itu sendiri.

b. Reformasi Pasca 9/11 dan Madrasa Reform Project

Peristiwa serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat menjadi titik balik yang mempercepat tekanan reformasi terhadap madrasah Pakistan secara dramatis. Pemerintah Pakistan di bawah Jenderal Pervez Musharraf tiba-tiba berada dalam posisi yang sangat tertekan, baik dari tuntutan komunitas internasional yang menuding madrasah sebagai sarang radikalisme, maupun dari kelompok ulama dalam negeri yang menolak keras segala bentuk intervensi asing terhadap lembaga pendidikan Islam. Musharraf kemudian meluncurkan serangkaian kebijakan reformasi, salah satunya dengan mendorong madrasah untuk memasukkan pelajaran umum ke dalam kurikulumnya.

Samdani dalam penelitiannya mencatat bahwa pemerintah mengancam akan menutup madrasah-madrasah yang ilegal dan memulangkan pelajar-pelajar asing yang belajar di Pakistan (Samdani, 2021). Ancaman ini memang berhasil mendorong sebagian pemimpin madrasah untuk bersikap lebih kooperatif dalam proses pendaftaran resmi. Namun demikian, perlu dipahami bahwa respons kepatuhan tersebut lebih bersifat taktis daripada transformatif para ulama pimpinan madrasah bersedia mendaftarkan lembaganya secara administratif, tetapi tidak serta-merta bersedia mengubah isi pengajaran mereka jaga selama generasi. Reformasi yang sejati membutuhkan lebih dari sekadar tekanan atau ancaman, ia membutuhkan dialog yang tulus dan ruang partisipasi yang bermakna bagi seluruh pemangku kepentingan.

Pemerintah kemudian meluncurkan program-program reformasi yang lebih terstruktur yang dikenal dengan Madrasa Reform Project (MRP) dan National Education Policy 2009. Program ini bertujuan mendorong madrasah untuk mengintegrasikan mata pelajaran umum seperti matematika, sains, dan bahasa Inggris ke dalam kurikulum madrasah, meningkatkan kualitas pelatihan guru, serta membangun sistem akreditasi yang setara antara madrasah dan sekolah umum. Dalam praktiknya, pelaksanaan MRP menghadapi banyak hambatan. Anggaran yang tersedia tidak mencukupi, guru bidang studi umum yang bersedia mengajar di madrasah sangat

sedikit, dan yang paling menentukan belum ada kepercayaan yang cukup antara pemerintah dan komunitas madrasah untuk membuat program ini berjalan dengan baik.

c. Single National Curriculum (SNC): Ambisi Besar dan Tantangannya

Upaya reformasi yang paling ambisius datang dari pemerintahan Imran Khan melalui *Single National Curriculum* atau SNC, yang mulai dirancang pada 2019 dan diterapkan secara bertahap mulai 2021. SNC dirancang sebagai kurikulum tunggal yang menyeragamkan standar pembelajaran di seluruh jenis lembaga pendidikan Pakistan sekolah negeri, sekolah swasta, dan madrasah tanpa terkecuali. Kebijakan ini lahir dari keprihatinan mendalam atas kesenjangan pendidikan yang telah lama menganga: kelas atas menyekolahkan anaknya di sekolah swasta internasional dengan standar Barat, kelas menengah di sekolah swasta nasional, sementara anak-anak dari keluarga miskin terpaksa memilih antara sekolah negeri yang kekurangan fasilitas atau madrasah yang gratis namun terbatas dalam akses lapangan kerja modern.

Melda Delvia dkk. menjelaskan bahwa SNC bertujuan untuk menghilangkan fragmentasi sistem pendidikan dan memastikan bahwa seluruh warga negara, tanpa memandang latar belakang sosial-ekonomi, memperoleh pendidikan Islam yang seragam dan sesuai dengan prinsip inklusif, moderat, serta patriotik (Delvia et al., 2025). Dengan SNC, untuk pertama kalinya dalam sejarah Pakistan, lulusan madrasah secara resmi mendapatkan hak mengikuti ujian kelulusan sekolah menengah yang setara dengan lulusan sekolah umum. Ini adalah terobosan yang tidak kecil.

Namun penerapan SNC tidaklah mulus. Provinsi Sindh menolak SNC dengan argumen bahwa kebijakan ini melanggar otonomi daerah. Provinsi lain menghadapi berbagai kendala teknis dalam pelaksanaannya. Di tingkat madrasah, reaksi yang muncul tidak jauh berbeda dari sebelumnya federasi-federasi keagamaan menganggap SNC sebagai upaya negara untuk mengontrol pendidikan agama yang selama ini menjadi wewenang mereka. Ketegangan antara kepentingan negara yang ingin menyeragamkan standar pendidikan dan kepentingan komunitas keagamaan yang ingin mempertahankan otonominya kembali mencuat ke permukaan.

d. Hambatan Struktural dan Resistensi Ideologis

Di balik berbagai program reformasi yang diluncurkan, terdapat dua kategori hambatan utama yang secara konsisten menghambat keberhasilan modernisasi madrasah di Pakistan. Hambatan pertama bersifat struktural: pemerintah Pakistan, yang perlu mengalokasikan anggaran yang sangat besar untuk pendidikan, belum mampu menyediakan sumber daya yang memadai untuk mendukung transformasi menyeluruh sistem madrasah. Infrastruktur fisik banyak madrasah masih sangat minim, tenaga pengajar bidang sains dan matematika langka, buku ajar yang mengintegrasikan nilai Islam dengan ilmu umum hampir tidak tersedia, dan sistem evaluasi yang adil antara madrasah dan sekolah umum belum sepenuhnya terwujud.

Hambatan kedua bersifat ideologis dan jauh lebih dalam. Melda Delvia dkk. Memberi analisis dengan menyebut kebijakan reformasi ini menghadapi resistensi yang cukup besar dari jaringan federasi madrasah yang memiliki otonomi tinggi (Delvia et al., 2025). Para pemimpin federasi ini tidak memandang kurikulum Dars-e-Nizami sekadar sebagai warisan intelektual yang dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan zaman. Bagi mereka, kurikulum tersebut adalah amanah keagamaan yang telah diwariskan dari ulama ke ulama selama berabad-abad. Mengubahnya apalagi atas desakan pemerintah yang mereka curigai dipengaruhi oleh agenda Barat sama saja dengan mengkhianati

tradisi keilmuan Islam yang telah terbukti melahirkan para ulama besar sepanjang sejarah.

Akar masalah yang paling dalam adalah ketimpangan antara dua dunia pendidikan yang berjalan secara terpisah, dunia madrasah yang mencetak ahli agama, dan dunia sekolah umum yang mencetak tenaga kerja modern. Selama kedua ini tidak berhasil dihubungkan secara substantif bukan sekadar secara administratif maka stratifikasi sosial antara lulusan madrasah dan lulusan sekolah umum akan terus berlanjut. Reformasi yang ideal harus mampu mempertahankan keunggulan-keunggulan sembari secara bersamaan membuka ruang bagi penguasaan ilmu-ilmu yang relevan dengan kebutuhan zaman.

e. Menuju Reformasi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Pengalaman reformasi madrasah di Pakistan selama dua dekade memberi pelajaran penting. Pertama, reformasi yang dipaksakan dari atas tanpa pelibatan yang tulus dari komunitas madrasah hampir selalu berakhir dengan kegagalan atau kepatuhan semu. Kedua, tekanan keamanan pasca 9/11 memang berhasil mempercepat beberapa proses administratif seperti registrasi madrasah, tapi tidak mampu mengubah orientasi ideologis dan pedagogis yang lebih dalam. Ketiga, reformasi kurikulum tidak cukup, perlukan investasi jangka panjang dalam pembangunan kapasitas guru, pengembangan bahan ajar, dan pembukaan jalur karir yang bermartabat bagi lulusan madrasah.

Melda Delvia dkk. menegaskan bahwa reformasi pendidikan Islam di Pakistan memerlukan pendekatan yang tidak hanya teknokratis, tetapi juga inklusif dan dialogis, melibatkan para ulama, pendidik, pembuat kebijakan, serta masyarakat luas (Delvia et al., 2025). Ini adalah prinsip yang sangat mendasar. Reformasi tidak dapat berhasil jika para ulama pimpinan madrasah hanya diperlakukan sebagai objek kebijakan yang harus dipatuhi, bukan sebagai mitra yang pandangannya dihormati dan dipertimbangkan. Di sinilah letak tantangan terbesar: membangun kepercayaan yang cukup antara pemerintah dan komunitas madrasah. Tanpa kepercayaan tersebut, setiap kebijakan reformasi, sebaik apapun niatnya, akan terus menghadapi tembok resistensi.

7. Madrasah dalam Konteks Pendidikan Islam Modern

Untuk memahami posisi madrasah dalam konteks pendidikan Islam modern, perlu terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud dengan “pendidikan Islam modern”. Pendidikan Islam dalam konteks modern adalah suatu sistem pendidikan yang berakar pada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah yang bertujuan untuk membentuk individu yang seimbang secara spiritual dan intelektual. Pendidikan ini tidak hanya berfokus pada transmisi ilmu pengetahuan, tetapi juga menekankan pada pembentukan karakter, iman, taqwa, serta akhlak mulia (Amrullah, 2024).

a. Dikotomi Ilmu dan Krisis Pendidikan Islam

Persoalan terdalam yang dihadapi madrasah dalam konteks pendidikan Islam modern sesungguhnya bukan soal kurikulum atau infrastruktur, melainkan persoalan epistemologis yang jauh lebih fundamental: bagaimana memandang hubungan antara ilmu agama dan ilmu umum. Di satu sisi, terdapat pandangan yang menempatkan ilmu agama sebagai satu-satunya ilmu yang bermakna dan bernilai, sementara ilmu umum dilihat sebagai produk peradaban asing yang berpotensi merusak iman. Di sisi lain, terdapat pandangan yang menerima ilmu umum modern secara penuh sementara

menempatkan ilmu agama hanya sebagai salah satu mata pelajaran di antara banyak mata pelajaran lainnya.

Fazlur Rahman, seorang pemikir Muslim asal Pakistan yang berpengaruh besar pada abad ke-20, sudah lama mengidentifikasi masalah ini sebagai akar dari kemunduran pendidikan Islam. Mohammad Khatami dan Sarah Dina dalam kajiannya tentang pemikiran Fazlur Rahman mencatat bahwa menurut Rahman, terdapat beberapa permasalahan dalam pendidikan yang perlu diperbaiki, yaitu: (1) ketidakselarasan tujuan pendidikan Islam dengan tujuan positif, (2) adanya dikotomi dalam sistem pendidikan Islam yang menyebabkan pembelajaran yang terfragmentasi, dan (3) rendahnya kualitas siswa (Khatami & Dina, 2024). Ini sangat relevan jika kita melihat realitas madrasah Pakistan.

Ketika seorang santri yang hanya dididik dalam ilmu agama tanpa pemahaman tentang dunia di luar itu sering mengalami kesulitan ketika harus menghadapi tantangan kehidupan modern. Begitu juga sebaliknya, siswa sekolah umum yang tidak mendapat fondasi agama yang kuat sering kehilangan arah di tengah berbagai pengaruh yang masuk dari luar. Tawaran solusi Rahman yang lebih mendasar: bukan sekadar menggabungkan dua jenis pelajaran dalam satu jadwal, melainkan membangun cara pandang baru bahwa semua ilmu pengetahuan pada dasarnya saling terhubung. Ilmu sains bisa menjadi cara untuk memahami kebesaran ciptaan Allah. Fiqh harus terus berdialog dengan perubahan sosial agar tetap hidup dan bermakna. Ketika pandangan ini berhasil diinternalisasikan dalam proses pendidikan, yang lahir bukan sekadar ahli agama atau ahli sains, melainkan manusia yang utuh.

b. Fungsi Sosial Madrasah yang Tidak Tergantikan

Di luar perdebatan kurikulum dan ideologis, terdapat satu fakta yang sering diabaikan dalam diskusi tentang reformasi madrasah: madrasah memainkan fungsi sosial yang sangat vital di Pakistan, khususnya bagi lapisan masyarakat yang paling rentan. Pakistan adalah negara dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi dan kesenjangan akses pendidikan yang sangat lebar antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Dalam kondisi ini, madrasah hadir sebagai lembaga pendidikan yang secara konsisten membuka pintunya bagi siapapun, tanpa memandang kemampuan ekonomi keluarganya. Madrasah tidak hanya memberikan pendidikan agama secara gratis, tetapi juga menyediakan tempat tinggal, makan, dan pakaian bagi santri yang berasal dari keluarga yang tidak mampu.

Samdani menjelaskan bahwa pendidikan agama Islam di Pakistan terbagi kepada tiga kategori yakni: Quranic School, Mosque Primary School, dan Madrasah (Samdani, 2021). Madrasah mewajibkan santrinya untuk menghafal Al-Qur'an 30 juz sebelum mempelajari ilmu-ilmu lainnya, sebuah tradisi yang sangat dihargai dan dijaga oleh komunitas Muslim Pakistan. Bagi banyak orang tua, melihat anaknya hafal Al-Qur'an adalah pencapaian yang nilainya tidak bisa diukur dengan apapun. Itulah sebabnya mengapa madrasah tetap diminati meskipun banyak yang sudah tahu bahwa prospek kerja lulusannya lebih terbatas dibanding lulusan sekolah umum.

Realitas ini menjelaskan mengapa upaya menghapus atau menggantikan madrasah dengan sistem pendidikan formal semata adalah sebuah kebijakan yang tidak hanya tidak realistis, tetapi juga tidak adil. Selama pemerintah Pakistan belum mampu menyediakan pendidikan gratis berkualitas yang merata hingga ke pelosok wilayah pedesaan dan daerah tertinggal, madrasah akan terus mengisi kekosongan itu.

Reformasi yang bermakna harus bertolak dari pengakuan atas kontribusi sosial madrasah ini, bukan dari sikap meremehkan atau mencurigainya.

c. Madrasah dan Tantangan Radikalisme: Menemukan Keseimbangan

Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian madrasah Pakistan memang memiliki kaitan dengan perkembangan radikalisme. Sebagian kecil madrasah yang memang menjadi tempat berkembangnya paham-paham keagamaan yang ekstrem, terutama yang lahir dari konteks perang Afghanistan dan masuknya pengaruh ideologi Wahhabi dari Arab Saudi. Namun, menyamaratakan semua madrasah dengan gambaran tersebut adalah kesalahan yang serius. Rizal Safarudin dkk. mengemukakan bahwa ada lima aliran besar pemikiran di madrasah Pakistan yaitu Deobandi, Barelwi, Ahli Hadith, Salafi dan Syiah (Samdani, 2021), dan mayoritas di antara mereka berfungsi sebagai lembaga pendidikan agama yang legitim. Ribuan imam masjid, guru agama, dan tokoh komunitas yang berperan positif di seluruh Pakistan adalah produk dari sistem madrasah ini. Masalah radikalisme memang nyata dan perlu ditangani, tetapi penanganannya harus dilakukan secara tepat sasaran bukan dengan mendiskreditkan seluruh sistem madrasah yang selama ini sudah memberikan kontribusi besar bagi pendidikan umat Islam Pakistan.

d. Perspektif Komparatif: Pelajaran bagi Indonesia

Indonesia dan Pakistan memiliki banyak kesamaan dalam hal tantangan pendidikan Islam. Keduanya adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim, keduanya memiliki tradisi madrasah atau pesantren yang kuat, dan keduanya bergulat dengan pertanyaan yang sama, bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan tuntutan pendidikan modern.

Samdani dalam perbandingannya antara Pakistan dan Indonesia menemukan bahwa lembaga pendidikan yang terdapat di Pakistan dan Indonesia juga hampir sama yakni adanya lembaga pendidikan Umum dan Agama/Madrasah serta sekolah tinggi/universitas baik umum dan keagamaan (Samdani, 2021). Namun ada perbedaan penting: Indonesia telah lebih jauh dalam mengintegrasikan madrasah ke dalam sistem pendidikan nasional. Madrasah di Indonesia mengikuti kurikulum nasional yang sudah mencakup mata pelajaran umum dan agama secara bersamaan, sehingga lulusannya memiliki akses yang lebih luas ke jenjang pendidikan tinggi dan dunia kerja. Pakistan bisa belajar dari model ini, meski tentu penyesuaian diperlukan mengingat konteks sosial dan politiknya yang berbeda.

Tantangan dikotomi ilmu agama dan ilmu umum juga masih terasa kuat di banyak lembaga pendidikan Islam Indonesia. Rizal Safarudin dkk. mengingatkan bahwa pendidikan Islam harus mampu mengintegrasikan antara ilmu pengetahuan umum dan agama berada dalam wawasan yang bertumpu pada konsep tauhid (Rizal Safarudin, Zulfamanna, , Masrur Lubis, 2024). Prinsip ini sebenarnya adalah titik temu yang paling kuat antara tradisi keilmuan Islam klasik dan kebutuhan pendidikan modern. Ketika ilmu pengetahuan dipahami sebagai cara untuk semakin mengenal dan mensyukuri kebesaran Allah, dan nilai-nilai keagamaan dipahami sebagai fondasi etis bagi seluruh aktivitas keilmuan, maka dualisme antara sekolah agama dan sekolah umum kehilangan nalar keberadaannya.

e. Masa Depan Madrasah dalam Pendidikan Islam Modern

Jika kita merangkum seluruh perjalanan sejarah panjang madrasah, tekanan reformasi, resistensi ideologis, fungsi sosial, dan tantangan modernitas maka yang

muncul adalah sebuah lembaga yang tengah berjuang menemukan jati dirinya di persimpangan sejarah. Madrasah Pakistan bukan institusi yang ingin mati. Ia terus hidup, terus beradaptasi dalam batas-batas yang dianggapnya tidak mengkhianati identitas keislamannya. Masa depan madrasah dalam konteks pendidikan Islam modern bergantung pada kemampuan para pemangku kepentingan untuk melakukan apa yang selama ini belum berhasil dilakukan: membangun jembatan yang kokoh antara keinginan pemerintah untuk memodernisasi madrasah demi kepentingan pembangunan nasional, dan keinginan komunitas madrasah untuk mempertahankan identitas keilmuan Islam yang mereka pandang sebagai amanah generasi. Jembatan itu hanya bisa dibangun di atas fondasi kepercayaan, dialog yang setara, dan pengakuan tulus atas kontribusi madrasah bagi masyarakat Pakistan selama berabad-abad.

Melda Delvia dkk. menyimpulkan bahwa pendidikan Islam yang adaptif dan moderat akan menjadi modal utama bagi Pakistan dalam membangun masyarakat yang inklusif, berdaya saing, dan tetap berakar pada nilai-nilai keislaman (Delvia et al., 2025). Pernyataan ini mengandung dua kata kunci yang patut direnungkan: adaptif dan moderat. Adaptif berarti madrasah harus mampu merespons perubahan zaman tanpa kehilangan substansi keilmuan Islamnya. Moderat berarti madrasah harus mampu mengembangkan tafsir keislaman yang inklusif, toleran, dan memberi ruang bagi keberagaman, bukan yang eksklusif dan menutup diri. Jika kedua prinsip ini dapat di internalisasikan secara sungguh-sungguh, maka madrasah tidak hanya akan tetap relevan ia akan kembali menjadi lembaga pendidikan yang diperhitungkan, sebagaimana pernah menjadi di masa kejayaan peradaban Islam.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa madrasah di Pakistan telah mengalami transformasi historis yang kompleks, mulai dari masa pra-kemerdekaan hingga upaya integrasi dalam sistem pendidikan modern. Perkembangan madrasah sangat dipengaruhi oleh dinamika politik domestik, seperti kebijakan Islamisasi pada era Zia ul-Haq, serta tekanan global pasca-peristiwa 11 September 2001 yang memicu stigma radikalisme. Kontribusi penelitian ini terletak pada analisis mendalam mengenai dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum serta tantangan implementasi kebijakan seperti Single National Curriculum (SNC) yang menghadapi resistensi ideologis dari federasi madrasah yang ingin mempertahankan otonomi kurikulum Dars-e-Nizami. Meskipun menghadapi berbagai hambatan struktural, madrasah tetap menjalankan fungsi sosial vital sebagai penyedia akses pendidikan bagi masyarakat ekonomi rendah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa reformasi pendidikan Islam di Pakistan tidak dapat dicapai hanya melalui pendekatan teknokratis atau tekanan administratif, melainkan memerlukan pendekatan inklusif dan dialogis yang melibatkan para ulama secara tulus. Rekomendasi utama penelitian ini adalah perlunya membangun kepercayaan antara pemerintah dan komunitas madrasah guna menciptakan sistem pendidikan yang adaptif dan moderat. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan sains dalam kerangka tauhid, madrasah diharapkan mampu melahirkan generasi yang kompeten secara intelektual dan spiritual tanpa kehilangan identitas keislamannya di era modern. Dengan demikian, sejarah perkembangan madrasah di Pakistan menunjukkan bahwa modernisasi pendidikan Islam bukanlah proses sekularisasi lembaga pendidikan agama, melainkan proses negosiasi yang terus berlangsung antara pelestarian tradisi keilmuan Islam dan tuntutan modernitas. Keberhasilan reformasi madrasah sangat

ditentukan oleh kemampuan negara dan komunitas ulama dalam membangun kemitraan yang inklusif, dialogis, dan berorientasi pada integrasi ilmu pengetahuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah. (2024). *Pendidikan Islam dalam Konteks Modern: Konsep, Implementasi dan Tantangan*. 6, 1–2.
- Arikarani, Y. (2019). Pendidikan Islam di Mesir, India, dan Pakistan. *El-Ghiroh*, XVI(1), 87–112.
- Arki, A. (2018). sejarah perjuangan sheikh mujiburrahman. *Khazanah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 3798.
- Azzahra, A. (2025). Penyelenggaraan Pendidikan Islam Kontemporer di Negara Maju dan Berkembang : Studi Komparatif Kualitatif terhadap Respons terhadap Tantangan Global. *Pendidikan dan Teknologi Indonesia*, 5(6), 1557–1562.
- Delvia, M., Rosyada, D., Zalnur, M., Sartini, T., & Elijonahdi. (2025). Reformasi Pendidikan Islam di Pakistan: Ketegangan Antara Konservatisme Agama dan Tuntutan Global. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 5(2), 861–877.
- Hidayat, F. (2020). *Pengantar Pemikiran Pendidikan Islam Bangunan Dasar, Diskursus, dan Dinamika*. Ahlimedia Press.
- Hidayat, F. (2022). *Konseptualisasi Pendidikan Agama Islam Berbasis Kebudayaan dan Gerakan Sosial* (M. B. Muvid, Ed.; 1st ed.). CV. Global Aksara Pers.
- Hidayat, F. (2023). Gagasan Pendidikan dalam Perspektif Priyayi dan Santri: Kajian Pemikiran Ki Hadjar Dewantara dan KH Ahmad Dahlan. *Matan: Journal of Islam and Muslim Society*, 5(1), 1–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.20884/1.matan.2023.5.1.7419>
- Hidayat, F. (2025). Trikotomi Filsafat Pendidikan Islam di Tengah Dinamika Lembaga Pendidikan Islam Kontemporer. *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan*, 9(1), 1–15. <https://doi.org/10.52266/tajdid.v9i1.4131>
- Hidayat, F. (2026). *Sejarah Dunia Islam Modern* (1st ed.). Saizu Publisher.
- Inayati, A., Santalia, I., Wahyuddin, G. (2022). Sejarah Islam di Pakistan, Ide Pembaharuan dan Perjuangan Muhammad Ali Janah. *Hospitaly*, 11(1).
- Khatami, M., & Dina, S. (2024). Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Modernisasi Pendidikan Islam Perspektif Fazlur Rahman dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam Kontemporer. *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 10(1), 184–194.
- Martajasa, F. (2024). *Perkembangan Pendidikan Islam di Pakistan*. 296–303.
- Safarudin, R., Zulfamanna, Lubis, M., Suprizen, Zulmuqim, & Zalnur, M. (2024). Pendidikan Islam di Pakistan. *JKS: Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(1), 168–175. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i1.4838>
- Samdani. (2021). Pendidikan Islam di Pakistan. *Educational Journal: General and Specific Research*, 1(1), 1–14.
- Sri Mulyati, Syamzan, S., & Susmihara et al. (2023). Perjuangan Muhammad Ali Jinnah. 6(1), 18–32.
- Wijianto, D. W., Nur, A., Puspitaningrum, Y., Kurniawati, H., Yulianti, T., Abdul, A., Shah, M. A. (2024). A comparison of Islamic religious practices in Pakistan and Indonesia: A sociocultural perspective. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya*, 110–121.